



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 4
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / Ke- 2
Dengan	: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Rabu, 5 September 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Membahas RKA K/L Tahun 2019
Hadir	: 1. .... orang dari 50 orang Anggota 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta jajarannya

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda membahas “**RKA-K/L BNPB Tahun 2019**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran BNPB Tahun 2019 sebesar **Rp619.425.671.000,-** (*Enam Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang akan dialokasikan untuk program:

<b>Program</b>	<b>Pagu Anggaran 2019</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	<b>Rp206.975.671.000,-</b> ( <i>Dua Ratus Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah</i> )
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	<b>Rp12.000.000.000,-</b> ( <i>Dua Belas Miliar Rupiah</i> )
Penanggulangan Bencana	<b>Rp400.450.000.000,-</b> ( <i>Empat Ratus Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah</i> )

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Pejabat Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran:
  - a. Tambahan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar **Rp514.276.336.000,-** (*Lima Ratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).
  - b. Tambahan dana cadangan penanggulangan bencana yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebesar **Rp6.5 Triliun** untuk Dana Siap Pakai dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dalam penyusunan RKA K/L Tahun 2019, dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Mendorong peningkatan pengalokasian anggaran BNPB yang tepat guna dan sasaran untuk meningkatkan kinerja BNPB dalam penanggulangan bencana.
  - b. Mengevaluasi dampak penurunan alokasi anggaran BNPB selama 5 tahun terakhir dengan target ketercapaian rencana strategis yang telah dibuat.
  - c. Meningkatkan jangkauan dan sasaran Program penguatan Penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat di daerah rawan bencana.
  - d. Mengoptimalkan program Desa Tangguh Bencana dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
  - e. Memberikan prioritas penanganan bencana di daerah yang kejadiannya rutin dan terus menerus.
  - f. Meningkatkan dan memperluas sebaran Program Sadar Bencana di seluruh wilayah yang termasuk dalam daerah rawan bencana.
  - g. Mengevaluasi pola penyebaran informasi bencana yang berdampak luas terhadap permasalahan pariwisata.
  - h. Memperhatikan dan mengoptimalkan peran serta keterlibatan masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.
  - i. Mengkaji kembali pola penanggulangan bencana yang efektif serta melakukan pemetaan agar bersinergi dengan Kementerian terkait dan potensi masyarakat lainnya.
  - j. Mengevaluasi kembali data-data korban bencana yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.
  - k. Membuat SOP perlindungan terhadap anak-anak di lokasi pengungsian
  - l. Memastikan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana berjalan sesuai dengan perencanaan.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 13.47 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**DR. H.M. ALI TAHER, SH. M.Hum.**